

STRATEGI MEMASUKKAN PJM-PRONANGKIS DALAM ALUR PEMBANGUNAN DAERAH

Oleh : Sudrajat¹

A. Pendahuluan

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan masalah mendasar yang segera ditangani. Penanggulangan kemiskinan yang *holistik* diperlukan keterlibatan semua pelaku terutama peran Pemerintah Daerah dalam merangsang partisipasi masyarakat melalui perluasan peran dan ruang dialog yang *reciprocal* dengan menggalang kemitraan sinergis antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Masalah kemiskinan kita yakini karena pudarnya rasa kepedulian, keberpihakan serta kebersamaan di kalangan masyarakat maupun dilingkungan para pengambil keputusan. Ada beberapa sebab kemiskinan antara lain sebagai berikut:

- 1) Secara umum pemerintah daerah belum memiliki rumusan strategi yang memadai, institusi TKPKD yang diharapkan menjadi motor penggerak dalam menggalang stakeholders pembangunan (Dinas, Swasta, NGO, Perguruan Tinggi dan pihak Swasta) dan atau kelompok yang merepresentasikan warga miskin, saat ini kondisinya belum mampu berperan secara strategis.
- 2) Akses masyarakat miskin sangat terbatas terhadap proses-proses pengambilan keputusan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin seperti; Sanitasi (Air Bersih, MCK), Permukiman, Gizi, Penanggulangan penyakit menular, Pendidikan dasar dan Kesehatan. Kurang dibukanya ruang partisipasi masyarakat miskin baik level basis (RT, RW) maupun di forum-forum strategis pengambilan keputusan seperti; Musbang Desa/Kel, Musbang Kecamatan dan Musyawarah

¹ Koordinator Kota-3 Kebumen KMW-13 P2KP 2-2

Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten yang terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin berakibat pula terhadap rendahnya akses mereka terhadap sumber daya pelayanan dasar tersebut.

- 3) Strategi dan program-program yang terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan masih bersifat artifisial, parsial dan tidak memiliki tujuan jangka panjang.
- 4) Orientasi program belum menitikberatkan pada pendekatan masyarakat miskin sebagai “pelaku utama” (community development best) yang juga sekaligus penerima manfaat (*beneficiaries*) secara langsung.
- 5) Perumusan strategi dan program penanggulangan kemiskinan belum mengadopsi metodologi dan proses daur program partisipatif

Gambar: Fenomena dan Sebab-Akibat Kemiskinan



B. Kedudukan PJM Pronangkis dalam Pembangunan Daerah

PJM–Pronangkis dalam keseluruhan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak dapat terpisahkan dari rencana induk pembangunan secara menyeluruh, karena penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas pembangunan yang terkait dengan peningkatan *Human Development Index (HDI)* dengan menitik beratkan pada pelaksanaan pencapaian tujuan Millenium Development Goals (MDG's) pada tahun 2015. Dalam mensukseskan tujuan pembangunan nasional tersebut PJM–Pronangkis yang fokus pada program penanggulangan kemiskinan diperlukan dukungan kebijakan (*policy*) yang lebih nyata dan berkelanjutan sehingga dapat efektif mengurangi angka kemiskinan. PJM–Pronangkis Kota/Kabupaten merupakan program strategis sebagai upaya memberikan pelayanan umum terhadap masyarakat dalam memenuhi hak–hak dasar sehingga mereka (masyarakat miskin) mampu menyelenggarakan hidupnya secara layak.

Keberlanjutan dan keberhasilan program nangkis di daerah secara umum tentu saja sangat bergantung pada dukungan Pemda dan masyarakat. Dukungan nyata kebijakan yang berpihak pada program penanggulangan (*pro-poor policy*) harus tercermin dalam alokasi sumber daya finansial secara nyata (*pro-poor budgeting*) dan berkelanjutan. Namun demikian bahwa keberhasilan program penanggulangan senantiasa tidak akan pula cukup efektif manakala dalam implementasinya tanpa dukungan dan keterlibatan kelompok warga miskin sebagai penerima manfaat (*beneficiaries*) langsung. Oleh karena institusi TKPK–D sebagai institusi yang dikhususkan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait dengan program penanggulangan

kemiskinan maka perlu terus didorong untuk menjadi “penggerak” dalam memperluas dukungan stakeholders lainnya.

C. Peran KBP sebagai Mitra Strategis Penanggulangan Kemiskinan di Daerah

Dalam rangka mendorong gerakan bersama penanggulangan kemiskinan di daerah, eksistensi KBP sebagai forum terbuka dalam menggalang kebersamaan stakeholders ditingkat Pemda perlu terus dikuatkan sehingga mampu menjadi mitra yang “konstruktif” dalam menjaga keberlanjutan program Nangkis di daerah. Keanggotaan KBP yang berlatarbelakang cukup beragam dari berbagai unsur (DPRD, Dinas–dinas, Swasta, Perguruan Tinggi, LSM) merupakan modal sosial penting yang diharapkan terus menerus berkiprah sehingga benar–banar dirasakan manfaatnya.

Peran KBP dalam jangka panjang diharapkan menjadi media dalam menyusun rencana program Nangkis serta ikutserta dalam pengawasan dan evaluasi program–program Nangkis bersama masyarakat melalui pembelajaran dilapangan (*lesson learned*). Dalam hal ini KBP dapat dijadikan media alternatif disamping mekanisme perencanaan, monitoring dan evaluasi yang secara formal telah ada ditingkat Daerah (seperti; Musrenbang Kabupaten, RKPD dll).

D. Strategi Dasar Intervensi

Strategi Memasukkan PJM–Pronangkis Dalam Alur Pembangunan Daerah:

Strategi Pertama, Penguatan BKM Sebagai Modal Sosial yang Dipercaya Masyarakat (*trust building*) yang Mampu Bermitra Secara Luas Dengan Stakeholders Lain (Pemda, Swasta, Perguruan Tinggi dan Kelompok Peduli Lainnya). Penguatan BKM sebagai “modal sosial” di masyarakat merupakan

investasi strategis, BKM yang merepresentasikan masyarakat karena nilai-nilai yang melembaga didalamnya (kejujuran, kepedulian, kesetaraan dan kerelawanan) diharapkan kelak menjadi “spirit” atau “kekuatan moral” (*moral force*) dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program penanggulangan kemiskinan di masyarakat. Penerapan nilai-nilai yang melembaga didalam tubuh BKM harus terefleksikan dalam daur program partisipatif (pembelajaran siklus di masyarakat) serta kontrol sosial di masyarakat.

Strategi Kedua, Sinergitas PJM–Pronangkis Melalui Forum Musrenbang, Proses sinergitas program Nangkis melalui forum perencanaan pembangunan Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten merupakan kegiatan mensinergikan PJM–Pronangkis BKM bersama pelaku pembangunan di tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten (Pemda) yang dilakukan secara berjenjang. Melalui forum ini diharapkan metode, proses dan program kemiskinan masyarakat yang partisipatoris dapat dintegrasikan dengan PJM–Pronangkis Kota/Kabupaten secara lebih holistik. Melalui alur proses yang berjenjang ini pula diharapkan PJM–Pronangkis BKM terakomodasi dalam RPJM–Desa, Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan (RPTK) dan Rencana Pembangunan Perangkat Daerah (RKPD)/KUAPBD secara lebih terukur (*measureble*) dan berkelanjutan.

Strategi Ketiga, Memperkuat Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) Sebagai Forum Terbuka dan Aktif Dalam Melakukan Kajian Program Penanggulangan Kemiskinan. Eksistensi KBP sebagai forum relawan yang memiliki komitmen untuk menggalang gerakan bersama penanggulangan kemiskinan di tingkat Kota/Kabupaten perlu terus diorong untuk mampu memperluas anggota yang terlibat didalamnya dari berbagai unsur seperti; DPRD, Dinas–dinas,

Swasta, Perguruan Tinggi, LSM dan kelompok pemeduli lainnya) serta terlibat aktif dalam kajian internal KBP maupun terlibat dalam forum–forum perencanaan pembangunan di tingkat Kota/Kabupaten dan kemiskinan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.

Strategi Keempat, Memperkuat TKPKD Mampu Menginisiasi Penyusunan PJM–Pronangkis Kota/Kabupaten Secara Partisipatif. TKPKD sebagai institusi yang dikhususkan berfungsi mengkoordinasikan dalam merumuskan strategi, perencanaan, evaluasi dan monitoring dalam program Nangkis di daerah perlu memperluas dan memfokuskan kegiatan *assessment* terhadap program–program yang tersebar di SKPD sehingga memungkinkan dapat dirumuskan menjadi kesatuan program Nangkis yang terintegrasi. TKPKD dalam kegiatan ini tentu saja diperlukan kemampuan mengorganisasikan potensi yang dimiliki serta seluruh stakeholders pendukung (BKM, Dinas, Swasta, LSM dll.) dan utamanya adalah “warga miskin” dalam merumuskan setiap lingkup kegiatan yang ada di tingkat SKPD yang dapat diarahkan menjadi program Nangkis (PJM–Pronangkis Kota/Kabupaten).

Alur Proses Memasukkan PJM Pronangkis Dalam Alur Pembangunan Daerah:

